



dpmptsp ➤

Dinas Penanaman Modal &
Relayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Tangerang Selatan

RENJA PERUBAHAN

2025



R. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**BAB I
PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan di setiap tahun anggaran. Pada tahun 2025 ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2025.

Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Renja DPMPTSP mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II, yang sekiranya dapat menjadi penyempurnaan kinerja DPMPTSP untuk peningkatan kinerja realisasi investasi Sistem Pelayanan Perizinan.

Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kota Tangerang Selatan merupakan dokumen perencanaan dengan Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Organisasi Perangkat Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Renja DPMPTSP Kota Tangerang Selatan disusun dengan melalui tahapan - tahapan sebagai berikut :

- ❖ Pembentukan tim penyusun

Anggota tim penyusun Renja adalah pejabat dan staf yang bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja yang merupakan perwakilan dari setiap pokja yang ada yang memiliki kompetensi dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang perencanaan serta memahami substansi tugas dan fungsi PD

❖ Orientasi mengenai Renja

Orientasi diberikan untuk menyamakan persepsi terkait teknis penyusunan Renja PD, hubungan Renja dengan dokumen perencanaan terkait, serta untuk mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

❖ Penyusunan agenda kerja

Agenda kerja disusun dengan memerinci setiap tahapan untuk perubahan kegiatan dalam kegiatan penyusunan dokumen Renja dengan satuan waktu sejak persiapan sampai dengan penetapan Renja.

❖ Pengumpulan data dan informasi

Setiap perubahan usulan program dan kegiatan perlu didukung data atau informasi yang memadai dan akurat hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja yang sesuai dengan tugas fungsi OPD.

Program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan untuk mengakomodasi kepentingan investor/ pengusaha guna memperoleh pelayanan yang lebih efisien, mudah, cepat dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan realisasi investasi.

Dalam melakukan perencanaan program dan kegiatan, maka pendekatan yang dipakai adalah pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Perencanaan program dan kegiatan tersebut dimanifestasikan melalui program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Tangerang Selatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan masyarakat.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Tangerang Selatan merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan serta Rancangan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029.

Terkait dengan itu Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 berisi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan mengoptimalkan kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2025. Masing-masing kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja dan rencana tingkat capaian atau target sesuai dengan kebijakan yang ditempuh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan berpatokan pada dokumen perencanaan tingkat Kota dan Renstra. Perubahan Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perumusan Perubahan RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD menyusun Perubahan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah daerah dijadikan sebagai kertas kerja (*working paper*). Suatu kertas kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan RKPD merupakan dokumen yang tak terpisah dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen).

Implementasi rencana pembangunan tahun 2025 telah berlangsung hampir 2 (dua) triwulan. Dalam perjalanannya, pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh OPD memungkinkan tidak berlangsung sesuai dengan rencana, sehingga Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2025 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya

dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
5. Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
6. Perubahan Renja OPD Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, disahkan dengan Surat Edaran Kepala Daerah.
7. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

Perubahan RKPD Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLNRI Tahun 2004 Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (LNRI Tahun 2007 Nomor 33, TLNRI Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2008 Nomor 61, TLNRI Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (LNRI Tahun 2008 Nomor 188, TLNRI Nomor 4935);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LNRI Tahun 2000 Nomor 112, TLNRI Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LNRI Tahun 2020 Nomor 245, TLNRI Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (LNRI Tahun 2004 Nomor 45, TLNRI Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 139, TLNRI Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LNRI Tahun 2006 Nomor 25, TLNRI Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (LNRI Tahun 2006 Nomor 96, TLNRI Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

- Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 21, TLNRI Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2019 Nomor 187, TLNRI Nomor 6402);
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031;
 21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Selatan 2025-2045;

22. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 – 2026;
23. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Wali kota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pintu;
25. Peraturan Wali kota Tangerang Selatan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2026;
27. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 adalah sebagai acuan untuk sinergitas antara penyusunan perencanaan program pembangunan, penganggaran serta pengawasan pembangunan Tahun 2025 yang merujuk pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 guna terwujudnya efektifitas alokasi anggaran dalam pembangunan. Dengan penyusunan Renja Perubahan diharapkan terjadi sinkronisasi prioritas kegiatan pembangunan OPD dan penyesuaian prioritas kerja Renja Perubahan OPD dengan plafon anggaran/pagu dana OPD yang termuat dalam APBD.

Tujuan penyusunan penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 :

1. Menjabarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke dalam rencana operasional tahunan;
2. Menyediakan arahan/pedoman bagi aparaturnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA P) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025;
3. Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Adanya pergeseran kegiatan dan perubahan target kinerja;
5. Pengurangan dan penambahan pagu anggaran untuk memenuhi target kinerja yang akan dicapai sesuai target rencana strategis pada tahun berjalan.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sistematika penyusunan Renja Perubahan DPMPTSP Kota Tangerang Selatan tahun 2025 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP KOTA TANGERANG SELATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kota Tangerang Selatan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Tangerang Selatan
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Tangerang Selatan

	2.4	Review Terhadap Rancangan P-RKPD
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III		RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPSTSP KOTA
		TANGERANG SELATAN
	3.1	Program dan Kegiatan
	3.2	Target Pendapatan
	3.3	Rencana Kerja dan Pendanaan
	3.4	Rencana Kerja dan Pendanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
	3.5	Rencana Kerja dan Pendanaan Fokus Pembangunan Kepala Daerah
	3.6	Rencana Kerja dan Pendanaan Hibah Dan Bantuan Sosial
	3.7	Rencana Kerja dan Pendanaan Kegiatan Hasil Musyawarah Pembangunan Kelurahan
BAB IV		PENUTUP

BAB II**HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP KOTA TANGERANG SELATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kota Tangerang Selatan.**

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra DPMPTSP meliputi kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP Triwulan II Tahun 2025, selanjutnya akan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026.

Program yang dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan pembangunan urusan wajib pelayanan dasar urusan penanaman modal yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2025 dimana pelaksanaannya didukung oleh 1 (satu) program rutin dan 5 (Lima) program prioritas, 12 Kegiatan dengan anggaran APBD sebesar Rp.33,615,787.686,- dengan serapan anggaran sampai dengan Bulan Juni Tahun 2025 (Triwulan II) adalah sebesar Rp. 13,761,378,664.00,- atau sebesar 40,94%.

Secara keseluruhan, tingkat capaian kinerja program pada Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap target RPJMD, telah mencapai kinerja outcome sebesar 71,26% dengan realisasi keuangan 40.94%. Dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan antara lain :

1. Koordinasi antar pokja terkadang masih mengalami kendala sehingga mengakibatkan penyusunan laporan tidak tepat waktu
2. Masih ada perusahaan yang belum tahu dan menerapkan NIB
3. Adanya Perubahan Anggaran (Pergeseran dan RAK) sehingga menyebabkan pencairan realisasi anggaran terhambat.

Keberhasilan capaian ini dikarenakan beberapa faktor antara lain meningkatnya motivasi kinerja aparatur DPMPTSP untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai target, Terjalinnnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan OPD terkait maupun dengan instansi terkait pada sektor penanaman modal dan pelayanan perijinan, Meningkatnya kesadaran dari para pelaku usaha di Kota Tangerang Selatan tentang ketentuan dan manfaat pelayanan perijinan, Tertibnya masyarakat dalam proses perizinan, Fasilitas aplikasi yang memadai sehingga para pelaku

usaha lebih mudah dalam mengakses, serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Adapun rincian capaian program prioritas sebagai berikut:

a Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung sasaran pertama Dinas yaitu meningkatnya Nilai Investasi. Pengukuran kinerja dengan indikator program Jumlah Investor, Jumlah Investor tahun 2024 adalah 14.873 Investor dari target 1785 Investor dengan capaian sebesar 833,22%.

Realisasi Jumlah Investor sampai dengan Bulan Juni Triwulan II tahun 2025 adalah 2203 Investor dari target 1860 Investor dengan capaian sebesar 118,44%.

Program ini didukung dengan 2 (dua) kegiatan yaitu Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.

Besaran anggaran program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Tahun 2025 Rp.41,052,400.00,- dan terealisasi sebesar Rp.0 (0%). Hal ini dikarenakan Serapan Anggaran yang besar terletak pada Triwulan III dan Triwulan IV.

b Program Promosi Penanaman Modal

Pelaksanaan Program Promosi Penanaman Modal diukur dengan satu Indikator yaitu Presentase peningkatan calon investor yang menerima informasi potensi investasi daerah. Indikator ini pada tahun 2024 memiliki target 100% dan terealisasi 150%.

Realisasi Presentase peningkatan calon investor yang menerima informasi potensi investasi daerah pada Tahun 2025 Bulan Juni Triwulan II tahun 2025 adalah 69% dari target 100% dengan capaian sebesar 69%.

Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator yaitu Jumlah Kegiatan pameran penanaman modal.

Besaran anggaran Program Promosi Penanaman Modal tahun 2025 Rp.489,116,000.00 dan terealisasi sebesar Rp.36,460,000.00

(7,45%). Hal ini dikarenakan Serapan Anggaran yang besar terletak pada Triwulan III dan Triwulan IV.

c Program Pelayanan Penanaman Modal

Program Pelayanan Penanaman Modal memiliki indikator Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan sesuai SOP. Pada Tahun 2024 indikator Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan sesuai SOP di targetkan sebesar 85% dan terealisasi sebesar 93,31% dengan capaian sebesar 109,78%.

Realisasi Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan sesuai SOP sampai dengan pada Tahun 2025 Bulan Juni Triwulan II tahun 2025 adalah 91,1% dari target 90% dengan capaian sebesar 101,22%.

Program Pelayanan Penanaman Modal didukung oleh 1 Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan Indikator Kegiatan Presentase Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Anggaran dan Realisasi Program Pelayanan Penanaman Modal Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp.296,597,130.00 dan pada triwulan II terealisasi sebesar Rp.90,030,000.00 Atau dengan capaian sebesar 30.35 %. Hal ini dikarenakan Serapan Anggaran yang besar terletak pada Triwulan III dan Triwulan IV.

d Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pelaksanaan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal didukung dengan 1 kegiatan. Program diukur dengan satu Indikator yaitu Presentase pengendalian terhadap penanaman modal. Pada Tahun 2024 indikator Presentase pengendalian terhadap penanaman modal di targetkan sebesar 80% dan terealisasi sebesar 92,67% dengan capaian sebesar 115,83%.

Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan indikator yaitu Jumlah Laporan Kegiatan Monev Penanaman Modal.

Pada tahun 2025 Triwulan II indikator Presentase pengendalian terhadap penanaman modal ditargetkan 100% dan terealisasi 98,33% dengan capaian 98,33%. Adapun faktor pendukung dari hasil

pelaksanaan kegiatan banyak pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha dan sesuai dengan pelaksanaan usahanya.

Besaran anggaran Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal tahun 2025 Rp.190,844,800.00 dengan realisasi Rp.61,116,000.00 dengan capaian 32.02%. Realisasi Anggaran tersebut tergolong minim dikarenakan ada Anggaran yang melalui proses pergeseran, sehingga realisasi jadi terhambat. Adanya 2 kegiatan Pembinaan yang dianggarkan pada triwulan III.

e Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pokja Perencanaan, Pengembangan dan Pengaduan Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengolahan data serta memelihara dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal diukur dengan indikator yaitu : Presentase potensi investasi yang terintegrasi dalam sistem informasi penanaman modal.

Pada Tahun 2024 Program Pengelolaan Data dan Sistem Penanaman Modal dengan Indikator Presentase potensi investasi yang terintegrasi dalam sistem informasi penanaman modal di targetkan sebesar 76% dan terealisasi sebesar 81,82% dengan capaian sebesar 107,66%.

Pada Tahun 2025 dari Target 100% dan pada Triwulan II terealisasi -81,82%, dengan capaian sebesar 81,82% belum mencapai target dikarenakan belum terlaksananya pengolahan data penanam modal.

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mengampu 1 (satu) Kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegerasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di ukur dengan Jumlah media informasi dan data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara Elektronik.

Anggaran Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegerasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota sebesar Rp.12,848,000.00,- dan tercapai sebesar Rp.4,672,000.00 dengan rata-rata ketercapaian kegiatan ini 36,36%. Minimnya serapan

anggaran ini disebabkan karena pekerjaan kegiatan ada di Triwulan III dan IV.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II bulan Juni tahun 2025 DPMPTSP Kota Tangerang Selatan, lebih jelas disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Tangerang Selatan
dan Pencapaian RENSTRA DPMPTSP Kota Tangerang Selatan s.d.Tahun 2025**

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 Triwulan II	
								Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Tujuan Meningkatkan Proporsi Investasi Terhadap PDRB	45%							
					Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai investasi	5,39 Triliun (Rupiah)	7,44 Triliun (Rupiah)	7,44 Triliun (Rupiah)	8,48 Triliun (Rupiah)	113,97	8,7 Triliun (Rupiah)	6,47 Triliun (Rupiah) 74,36
					Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan dan Non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,50 Nilai	89,05 Nilai	89,50 Nilai	89,56 Nilai	100,05	90,00 Nilai	89,51 Nilai 100,05
2					Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2	18				Bidang Urusan Penanaman Modal								
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	60	N/A tidak ada penilaian LKE PMB digantikan dengan nilai RB Tematik	58	N/A tidak ada penilaian LKE PMB digantikan dengan nilai RB Tematik	0,00	60	N/A tidak ada penilaian LKE PMB digantikan dengan nilai RB Tematik 0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 Triwulan II	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						Predikat SAKIP	BB	A	A	A	100,00	A	A	100,00
2	18	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	84,4	87,01	84,35	89,10	105,63	84,40	89,10	105,81
2	18	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Doc	6 Doc	8 Doc	9 Doc	112,50	8 Doc	1 Doc	12,50
2	18	1	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Doc	2 Doc	1 Doc	2 Doc	100,00	2 Doc	0	0,00
2	18	1	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Doc	2 Doc	2 Doc	2 Doc	100,00	2 Doc	1 Doc	100,00
2	18	1	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Doc	1 Doc	1 Doc	1 Doc	100,00	1 Doc	0	0,00
2	18	1	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Doc	2 Doc	1 Doc	1 Doc	100,00	2 Doc	1 Doc	100,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 Triwulan II	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	18	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Lap	10 Lap	11 Lap	11 Lap	100,00	5 Lap	0 Lap	0,00
2	18	1	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Lap	6 Lap	8 Lap	8 Lap	100,00	5 Lap	0 Lap	0,00
2	18	1	2.01	08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	0	0	0	0	1 Doc		
2	18	1	2.01	09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	1 Data		
2	18	1	2.01	10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	1 Berita Acara		

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 Triwulan II	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	18	1	2.01	11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	0	0	0	0	0	3 Dokumen		
2	18	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Capaian Realisasi Keuangan pertahun	94,00%	96,14%	92%	98,57%	107,14	93%	52,49%	57,05
2	18	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Org	59 Org	56 Org	56 Org	100,00	154 Org	56	100,00
2	18	1	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Doc	1 Doc	1 Doc	1 Doc	100,00	1 Doc	0	0,00
2	18	1	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	10 Doc	10 Doc	1 Doc	1 Doc	100,00	1 Doc	0	0,00
2	18	1	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Doc	1 Doc	1 Doc	1 Doc	100,00	1 Doc	1 Doc	100,00
2	18	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100,00	1 Lap	0	0,00
2	18	1	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Doc	2 Doc	1 Doc	1 Doc	100,00	1 Doc	0	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 Triwulan II	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	18	1	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6 Lap	6 Lap	12 Lap	12 Lap	100,00	6 Lap	3 Lap	25,00
2	18	1	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Doc	1 Doc	1 Doc	1 Doc	100,00	1 Doc	1 Doc	100,00
2	18	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	0	0,00
2	18	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	45 Org	60 Org	60 Org	100,00	60 Org	60 Org	100,00
2	18	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	35 Org	60 Org	60 Org	100,00	60 Org	60 Org	100,00
2	18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	50,00	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 Triwulan II	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	18	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100,00	3 Paket	3 Paket	100,00
2	18	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	3 Paket	3 Paket	100,00	3 Paket	0	0,00
2	18	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100,00	3 Paket	1 Paket	33,33
2	18	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	100,00	6 Paket	0	0,00
2	18	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Doc	3 Doc	3 Doc	3 Doc	100,00	3 Doc	0	0,00
2	18	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1 Lap	1 Lap	2 Lap	200,00	1 Lap	0	0,00
2	18	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Paket	0	0	0	0	0	0	0
2	18	1	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	0	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 Triwulan II	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	18	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100,00	1 Tahun	0	0,00
2	18	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	0,00	1 Lap	0	0,00
2	18	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100,00	1 Lap	0	0,00
2	18	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100,00	1 Lap	0	0,00
2	18	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100,00	1 Lap	0	0,00
2	18	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	6 Bulan	50,00
2	18	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100,00	2 Unit	0	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 Triwulan II	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	18	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	40 Unit	38 Unit	38 Unit	38 Unit	100,00	36 Unit	0	0,00
2	18	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	11 Unit	10 Unit	10 Unit	100,00	10 Unit	3 Unit	30,00
2	18	1	2.08	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00	1 Unit	0	0,00
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor	1860 Investor	8791 Investor	1785 Investor	14873 Investor	833,22	1860 Investor	2908 Investor	162,91
2	18	2	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Doc	1 Doc	1 Doc	1 Doc	100,00	1 Doc	0	0,00
2	18	2	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Doc	1 Doc	1 Doc	1 Doc	100,00	1 Doc	0	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 Triwulan II	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	18	2	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1 Doc	1 Doc	0	0	0	0	0	0,00
2	18	2	2.01	03	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	0	0	1 Doc	1 Doc	100,00	1 Doc	0	0,00
2	18	2	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Peta Potensi Investasi	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100,00	1 Lap	0	0,00
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Doc	1 Doc	1 Doc	1 Doc	100,00	1 Doc	0	0,00
2	18	2	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Doc	1 Doc	0	0	0	0	0	0,00
2	18	2	2.02	04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	0	0	1 Doc	1 Doc	100,00	1 Doc	1 Doc	100,00
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase peningkatan calon investor yang menerima informasi potensi investasi daerah	100%	150%	100%	121%	121,00	100%	79,00%	79,00
2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pameran penanaman modal	3 Kali	3 Kali	2 Kali	3 Kali	150,00	2 Kali	1 Kali	66,67

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 Triwulan II	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	18	3	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Doc	1 Doc	0	0	0	0	0	0,00
2	18	3	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Doc	1 Doc	1 Doc	1 Doc	100,00	1 Doc	0	0,00
2	18	3	2.01	03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	0	0	1 Doc	1 Doc	100,00	1 Doc	0	0,00
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan sesuai SOP	90%	75,54%	85%	93,31%	109,78	90%	73,47%	86,44
2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	50%	50,00
2	18	4	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6400 Pelaku Usaha	15863 Pelaku Usaha	0	0	0	0	0	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 Triwulan II	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	18	4	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	5400 Kegiatan Usaha	6953	0	0	0	0	0	0,00
2	18	4	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	260 Org	311 Org	0	0	0	0	0	0,00
2	18	4	2.01	04	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	0	0	6200 Pelaku Usaha	17733 Pelaku Usaha	286,02	6300 Pelaku Usaha	3290 Pelaku Usaha	53,06
2	18	4	2.01	05	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	0	0	280 Org	522 Pelaku Usaha	186,43	270 Org	0 Org	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 Triwulan II	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	18	4	2.01	06	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	0	0	5200 Kegiatan Usaha	8363 Kegiatan Usaha	160,83	5300 Kegiatan Usaha	1990 Kegiatan Usaha	38,27
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Presentase pengendalian terhadap penanaman modal	100%	57,33%	80%	92,67%	115,84	100%	65,22%	81,53
2	18	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Monev Penanaman Modal	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	100,00	4 Lap	2 Lap	50,00
2	18	5	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Pelaku Usaha	222 Pelaku Usaha	0	0	0	0	0	0,00
2	18	5	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	28 Kegiatan Usaha	305 Kegiatan Usaha	0	0	0	0	0	0,00
2	18	5	2.01	04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	0	0	11 Kegiatan Usaha	288 Kegiatan Usaha	2618,18	11 Kegiatan Usaha	0	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 Triwulan II	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	18	5	2.01	05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	0	0	301 Pelaku Usaha	359 Pelaku Usaha	119,27	348 Pelaku Usaha	0	0,00
2	18	5	2.01	06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	0	0	350 Kegiatan Usaha	469 Kegiatan Usaha	134,00	350 Kegiatan Usaha	0	0,00
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Presentase potensi investasi yang terintegrasi dalam sistem informasi penanaman modal	100%	36,36%	76%	81,82%	107,66	100%	36,36%	47,84
2	18	6	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media informasi dan data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara Elektronik	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100,00	1 Jenis	0	0,00
2	18	6	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan	1 Data dan Informasi	1 Data dan Informasi	0	0	0	0	0	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 Triwulan II	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan								
2	18	6	2.01	02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	0	0	1 Doc	1 Doc	100,00	1 Doc	0	0,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan, memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dalam melaksanakan tugas DPMPTSP juga menyelenggarakan fungsi fungsi yang harus dilaksanakan adalah melakukan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan dan Peningkatan Layanan, serta Pengelolaan Data dan Informasi. Sekretaris dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrative dan teknis yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, dan umum serta mengoordinasikan pelaksanaan administrasi lingkup Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut maka penjabaran penjelasan ringkas tentang capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan pada renja tahun sebelumnya.

Indikator kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan terletak pada sasaran pembangunan dalam renstra. Indikator kinerja pelayanan merupakan indikator kinerja yang bersifat hasil (*outcome*) dan menggambarkan indikator kinerja program-program yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran pembangunan dimaksud. Indikator kinerja pelayanan ini dapat berupa indikator kinerja kunci (IKK) maupun indikator yang dikreasikan guna mengukur tingkat layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan.

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan, sasaran dan indikator kinerjanya akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

2.2.1 Indikator Kinerja Awal

- Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon II adalah sebagai berikut :
 1. Meningkatnya Nilai Investasi Indikator Kinerja Utama ***"Nilai Investasi"***
 2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan dan Non Perizinan Indikator Kinerja Utama ***"Indeks Kepuasan Masyarakat"***.
- Indikator Kinerja Individu (IKI) Eselon III adalah sebagai berikut :
 1. Jumlah Investor
 2. Presentase peningkatan calon investor yang menerima informasi potensi investasi daerah
 3. Presentase Pengendalian terhadap Penanaman Modal
 4. Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan sesuai SOP
 5. Presentase Potensi Investasi Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Penanaman Modal
 6. Nilai PM RB perangkat daerah
 7. Predikat SAKIP.

2.2.2 Indikator Kinerja Perubahan

- Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon II adalah sebagai berikut :
 1. Meningkatnya realisasi investasi daerah Indikator Kinerja Utama ***"Nilai investasi PMDN dan PMA"***
 2. Meningkatnya kualitas pelayanan dan kemudahan investasi Indikator Kinerja Utama ***"Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Perizinan) dan Presentase Ketepatan Waktu Perizinan Sesuai SOP"***.
 3. Meningkatnya kualitas tata kelola Perangkat Daerah Indikator Kinerja Utama ***"Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah, Persentase Kepatuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah dan Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Yang dimanfaatkan"***.
- Indikator Kinerja Individu (IKI) Eselon III adalah sebagai berikut :
 1. Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi
 2. Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha
 3. Realisasi Total terhadap Target Investasi
 4. Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan
 5. Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal
 6. Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 7. Persentase Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
 8. Persentase Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah
 9. Persentase pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah.

Tabel 2. 2

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPSTSP Kota Tangerang Selatan

No.	Indikator Perangkat Daerah	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Januari s.d Juni 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Meningkatkan Proporsi Investasi Terhadap PDRB									
		-	Nilai Investasi	-	4,42 T (Rp)	4,66 T (Rp)	7,4 T (Rp)	8,7 T (Rp)	6,47 T (Rp)	Mengacu dalam Dokumen RPJMD 2021-2026
		-	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Perizinan)	-	88,5	89,00	89,50	90,00	89,18	Mengacu dalam Dokumen Renstra 2021-2026

Pada table diatas merupakan pencapaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan dimana terdapat 2 indikator yang tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2021-2026.

Indikator Nilai investasi adalah indikator yang menjadi urusan penanaman modal dimana setiap tahunnya realisasi selalu melebihi dari target yang dimana Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal dalam Negeri adalah satuan targetnya yang indikatornya berupa nilai investasi atau uang rupiah.

Indikator selanjutnya Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai target satuannya adalah nilai dari hasil survey masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Tangerang Selatan

2.3.1. Tingkat Pelayanan DPMPTSP Kota Tangerang Selatan

Dalam menyelenggarakan tugas pokok yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kota Tangerang Selatan, DPMPTSP Kota Tangerang Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan dan pelaksanaan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran bidang kesekretariatan, penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis di bidang kesekretariatan, penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. perumusan dan penyusunan rancangan produk hukum Daerah di bidang kesekretariatan, penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan, penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Dinas;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan urusan pemerintahan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup Daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal;
- h. penetapan pemberian fasilitas atau insentif bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
- i. pembuatan peta potensi investasi Daerah;
- j. penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;

- k. pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
- l. pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
- m. pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah;
- n. penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup dinas;
- o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Dinas;
- p. pelaksanaan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Dinas; dan
- q. pelaksanaan tugas lain dari Wali Kota sesuai tugas dan fungsi.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas, maka kinerja pelayanan pada DPMPTSP lebih difokuskan pada Isu Strategis **“Peningkatan iklim ramah investasi”** penanaman modal mendorong investasi amat penting untuk meningkatkan kapasitas perekonomian. Melalui kegiatan prioritas Temu Investor pada tahun 2025 DPMPTSP Kota Tangsel akan terus berkomitmen menjaga iklim investasi yang ramah dan kondusif. Komitmen tersebut diwujudkan dengan terus berupaya menjaga stabilitas kondisi domestik sambil meminimalisir dampak ekonomi global yang dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan citra positif Kota Tangerang Selatan di mata investor baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, kinerja DPMPTSP juga diukur dari peningkatan realisasi investasi di Kota Tangerang Selatan setiap tahunnya, baik itu dari segi prosentase pertumbuhan jumlah proyek PMA dan PMDN dari tahun ke tahun, jumlah nilai investasi, maupun penyerapan tenaga kerja.

Kinerja DPMPTSP Kota Tangerang Selatan juga dapat diukur dari pelayanan yang diberikan kepada investor dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi dalam merealisasikan investasinya di Kota Tangerang Selatan. Tolak ukur kinerja lainnya adalah dalam pelayanan perizinan yang diberikan kepada investor dan penanganan pengaduan masyarakat.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta masukan dari penyelenggara pelayanan Kota Tangerang Selatan, teridentifikasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 3

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	
Investasi Belum Optimal	Masih Rendahnya jumlah investor	1	Belum adanya pemberian insentif/ kemudahan investasi dibidang penanaman modal
		2	Belum tersusunnya peta potensi investasi
	Kurangnya informasi potensi investasi daerah	1	Belum Optimalnya pemanfaatan media promosi penanaman modal
	Belum Optimalnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2	Belum tersedianya data dan informasi terkait peluang potensi investasi
		1	Belum optimalnya monitoring evaluasi kegiatan penanaman modal
Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non perizinan	Belum optimalnya ketepatan waktu pelayanan sesuai SOP	1	Belum optimalnya pelaksanaan dan koordinasi tim teknis dalam pelayanan perizinan dan non perizinan

2.3.3. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan DPMPTSP Kota Tangerang Selatan

TANTANGAN :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing Kota Tangerang Selatan.
2. Meningkatkan citra Kota Tangerang Selatan sebagai Kota tujuan penanaman modal yang prospektif dan kondusif dan menjanjikan bagi para investor baik dalam maupun luar negeri.
3. Meningkatkan kerjasama penanaman modal pemerintah dengan badan usaha sebagai percepatan investasi di Kota Tangerang Selatan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal yang berorientasi pada kemudahan dan kecapatan pelayanan yang berdampak pada kondusifnya iklim investasi di Kota Tangerang Selatan.
5. Meningkatkan realisasi dan diversifikasi penanaman modal melalui proyek – proyek investasi untuk meningkatkan percepatan ekonomi kota.
6. Diseminasi dan implementasi regulasi baru dalam urusan penanaman modal dan perizinan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) beserta peraturan pelaksanaannya
7. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu secara cepat dan memuaskan masyarakat; dan Pengembangan teknologi informasi.

PELUANG :

1. Tingginya dukungan pemerintah pusat terhadap iklim usaha yang kondusif;
2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029;

4. Tersedianya rumusan kebijakan penanaman modal yang mendukung iklim investasi Kota Tangerang Selatan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan kebijakan penanaman modal yang diarahkan pada peningkatan daya saing kota.
5. Ketersediaan infrastruktur pendukung penanaman modal;
6. Peluang investasi yang siap ditawarkan, prospektif dan potensial;

Berdasarkan gambaran tentang tantangan dan peluang yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu kedepan, isu penting yang perlu ditindaklanjuti oleh DPMPTSP antara lain sebagai berikut :

- a) Review terhadap kelembagaan secara terus menerus menyesuaikan dengan dinamika dan aturan hukum yang berkembang;
- b) Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
- c) Kapasitas sumber daya manusia aparatur perlu ditingkatkan guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
- d) Belum optimalnya sistem aplikasi dan database penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
- e) Perbaikan sistem pengendalian internal untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian.
- f) Belum optimalnya koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi,
- g) Belum adanya kebijakan penguatan kelembagaan DPMPTSP sebagai koordinator untuk menerbitkan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP).

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Hasil review terhadap Rancangan Perubahan RKPD dan Hasil Analisis Kebutuhan untuk pelaksanaan Tahun 2025 dapat dilihat tabel Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2. 4

**Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan**

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Urusan Penanaman Modal				31.991.914.349	Urusan Penanaman Modal				31.991.914.349	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Nilai PM RB perangkat daerah	60	30.761.456.019	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Nilai PM RB perangkat daerah	60	30.761.456.019	
			Predikat SAKIP	A				Predikat SAKIP	A		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Nilai AKIP	84,35	111.978.178	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Nilai AKIP	84,35	111.978.178	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	74.592.659	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	74.592.659	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 Dokumen	2.366.460	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 Dokumen	2.366.460	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dokumen RKA-SKPD					Dokumen RKA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.981.842	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2.981.842	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.528.162	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.528.162	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	4.180.535	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	4.180.535	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	8.772.424	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	8.772.424	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	7.045.633	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	7.045.633	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1.872.210	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1.872.210	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	1.768.642	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	1.768.642	
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	Tangerang Selatan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu	1 Berita Acara	2.407.296	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	Tangerang Selatan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu	1 Berita Acara	2.407.296	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	Perencanaan Perangkat Daerah		dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Perencanaan Perangkat Daerah		dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	5 Dokumen	3.462.315	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	5 Dokumen	3.462.315	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Presentase Capaian Realisasi Keuangan pertahun	93,00%	23.153.107.892	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Presentase Capaian Realisasi Keuangan pertahun	93,00%	23.153.107.892	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tangerang Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang	23.124.032.465	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tangerang Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang	23.124.032.465	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	584.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	584.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.509.758	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.509.758	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	876.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	876.000	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.103.528	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.103.528	
	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	1.752.000	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	1.752.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	6 Laporan	19.157.750	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	6 Laporan	19.157.750	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.092.391	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.092.391	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Presentase Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	208.680.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Presentase Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	208.680.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tangerang Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	8.680.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tangerang Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	8.680.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tangerang Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	200.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tangerang Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	200.000.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Presentase Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.158.637.693	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Presentase Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.158.637.693	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	17.315.994	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	17.315.994	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	202.796.130	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	202.796.130	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	135.578.969	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	135.578.969	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	271.821.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	271.821.600	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	462.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	462.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	68.625.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	68.625.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tangerang Selatan	Waktu Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	5.233.084.238	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tangerang Selatan	Waktu Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	5.233.084.238	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	894.960.326	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	894.960.326	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	78.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	78.000.000	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perlengkapan Kantor		Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Perlengkapan Kantor		Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.260.123.912	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.260.123.912	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tangerang Selatan	Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	895.968.018	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tangerang Selatan	Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	895.968.018	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tangerang Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	98.840.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tangerang Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	98.840.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tangerang Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	514.600.072	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tangerang Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	514.600.072	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tangerang Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	277.477.946	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tangerang Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	277.477.946	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tangerang Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	5.050.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tangerang Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	5.050.000	
II	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Tangerang Selatan	Jumlah Investor	1860 Investor	31.520.200	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Tangerang Selatan	Jumlah Investor	1860 Investor	31.520.200	
1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	16.080.600	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	16.080.600	
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tangerang Selatan	Jumlah Peraturan Daerah /Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	4.766.600	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tangerang Selatan	Jumlah Peraturan Daerah /Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	4.766.600	
	Fasilitasi Kemitraan	Tangerang	Jumlah	1 Kegiatan Usaha	11.314.000	Fasilitasi Kemitraan	Tangerang	Jumlah	1 Kegiatan Usaha	11.314.000	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Selatan	Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah			yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Selatan	Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah			
2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Peta Potensi Investasi	1 Laporan	15.439.600	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Peta Potensi Investasi	1 Laporan	15.439.600	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	12.809.600	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	12.809.600	
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.630.000	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.630.000	
III	Program Promosi Penanaman Modal	Tangerang Selatan	Presentase peningkatan calon investor yang menerima informasi potensi investasi daerah	100%	698.648.200	Program Promosi Penanaman Modal	Tangerang Selatan	Presentase peningkatan calon investor yang menerima informasi potensi investasi daerah	100%	698.648.200	
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Kegiatan pameran penanaman modal	3 Kali	698.648.200	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Kegiatan pameran penanaman modal	3 Kali	698.648.200	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan	1 Dokumen	696.198.200	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan	1 Dokumen	696.198.200	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Modal Daerah Kabupaten/ Kota		Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota			Modal Daerah Kabupaten/ Kota		Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota			
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	Tangerang Selatan	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/ Kota	1 Dokumen	2.450.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	Tangerang Selatan	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/ Kota	1 Dokumen	2.450.000	
IV	Program Pelayanan Penanaman Modal	Tangerang Selatan	Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan sesuai SOP	90%	296.597.130	Program Pelayanan Penanaman Modal	Tangerang Selatan	Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan sesuai SOP	90%	296.597.130	
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tangerang Selatan	Presentase Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	296.597.130	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tangerang Selatan	Presentase Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	296.597.130	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tangerang Selatan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi	6300 Pelaku Usaha	31.520.380	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tangerang Selatan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6300 Pelaku Usaha	31.520.380	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			secara Elektronik								
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Tangerang Selatan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	270 Orang	118.364.750	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Tangerang Selatan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	270 Orang	118.364.750	
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Tangerang Selatan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	5300 Kegiatan Usaha	146.712.000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Tangerang Selatan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	5300 Kegiatan Usaha	146.712.000	
V	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tangerang Selatan	Presentase Pengendalian terhadap Penanaman Modal	100%	190.844.800	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tangerang Selatan	Presentase Pengendalian terhadap Penanaman Modal	100%	190.844.800	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Kegiatan Monev Penanaman Modal	4 Laporan	190.844.800	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Kegiatan Monev Penanaman Modal	4 Laporan	190.844.800	
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Tangerang Selatan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5 Kegiatan Usaha	44.005.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Tangerang Selatan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5 Kegiatan Usaha	44.005.000	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Tangerang Selatan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	30 Pelaku Usaha	59.020.800	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Tangerang Selatan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	30 Pelaku Usaha	59.020.800	
	Pengawasan Penanaman Modal	Tangerang Selatan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data,	22 Kegiatan Usaha	87.819.000	Pengawasan Penanaman Modal	Tangerang Selatan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data,	22 Kegiatan Usaha	87.819.000	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha					Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			
VI	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tangerang Selatan	Presentase potensi investasi yang terintegrasi dalam sistem informasi penanaman modal	100%	12.848.000	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tangerang Selatan	Presentase potensi investasi yang terintegrasi dalam sistem informasi penanaman modal	100%	12.848.000	
1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah media informasi dan data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara Elektronik	1 Jenis	12.848.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah media informasi dan data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara Elektronik	1 Jenis	12.848.000	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tangerang Selatan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	12.848.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tangerang Selatan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	12.848.000	
JUMLAH					31.991.914.349	JUMLAH				31.991.914.349	

Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 yang tersaji pada Tabel 2.4 diatas merupakan telaahan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/ kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan berdasarkan rancangan RKPD. Pada rancangan Perubahan RKPD pada Tabel 2.4 (pada kolom 2 s/d kolom 6), merupakan analisis rancangan program dan kegiatan dari masing-masing bagian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Materi tersebut dipergunakan untuk menyusun rancangan rencana kerja pada perubahan TA 2024.

Selanjutnya, pada hasil analisis kebutuhan RKPD (pada kolom 7 s/d kolom 11) adalah penyampaian pagu hasil analisi kebutuhan Perubahan RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025. Dengan adanya pagu hasil analisi kebutuhan Perubahan RKPD dijadikan pedoman dalam penyempurnaan penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan tahunan Kota Tangerang Selatan selain mengacu pada RPJPD dan RPJMD juga merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah melalui arah kebijakan pembangunan tahunan yang dalam perumusan dan penyusunannya melibatkan berbagai unsur masyarakat, meliputi LSM, Perguruan Tinggi, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, kelompok usaha dan DPRD. Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum OPD dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang dan Forum OPD tersebut kemudian dapat diaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Dalam proses penyusunan perencanaan tersebut diatas

BAB III

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP
KOTA TANGERANG SELATAN**

3.1 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung Visi Pemerintah Kota Tangerang Selatan **“TANGERANG SELATAN UNGGUL, INKLUSIF, INOVATIF, KOLABORATIF MENUJU KOTA LESTARI”** maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan mengambil Misi 1 (satu) dari 4 (Empat) yang telah ditetapkan dalam Rancangan RPJMD Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut:

**“MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERKEADILAN
BERBASIS POTENSI UNGGULAN DAERAH, INOVASI DAN TEKNOLOGI”**

Adapun Tujuan, Sasaran serta Indikator Sasaran sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Terwujudnya Investasi Daerah yang Unggul		Rasio Investasi Terhadap PDRB	%	7,57
	Sasaran 1 Meningkatnya iklim investasi daerah yang kompetitif.	Nilai investasi PMDN dan PMA	Triliun (Rp)	8,7
	Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pelayanan dan kemudahan investasi.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Perizinan)	Indeks	90
		Persentase Ketepatan Waktu Perizinan Sesuai SOP	%	93,5
	Sasaran 3 Meningkatnya kualitas tata kelola Perangkat Daerah.	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	89,12
		Persentase Kepatuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	%	100
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Yang dimanfaatkan	Inovasi	1

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan yaitu Terwujudnya Iklim Investasi Daerah Yang Kompetitif, telah ditetapkan sasaran melalui pencapaian Meningkatkan realisasi investasi daerah, Meningkatkan

kualitas pelayanan dan kemudahan investasi dan Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah.

Untuk tercapainya Sasaran Strategis yang telah ditargetkan maka perlu didukung dengan program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan sesuai dengan rencana yang sudah ditargetkan. Adapun program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan rencana kerja terdiri dari 6 Program dengan 12 kegiatan dan 47 Sub Kegiatan total pagu indikatif sebesar Rp.31,991,914,349.00,- dan sebagian besar program, kegiatan dan sub kegiatan dilaksanakan lokusnya terpusat di Mal Pelayanan Publik (MPP).

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Pembuatan peta potensi kabupaten/kota. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Jumlah Investor dengan target sebesar 1860 Investor.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Presentase peningkatan calon investor yang menerima informasi potensi investasi daerah dengan target sebesar 100%.

c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Presentase Pengendalian terhadap Penanaman Modal dengan target sebesar 100%.

d. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota. Program ini diarahkan

pada pencapaian indikator Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan sesuai SOP sebesar 90%.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Presentase potensi investasi yang terintegrasi dalam sistem informasi penanaman modal dengan target sebesar 100%.

f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Nilai PM RB perangkat daerah dengan target sebesar 60,00 dan indikator Predikat SAKIP dengan target sebesar A. Berikut adalah Tabel 3.1 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan:

Tabel 3. 1

**Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025**

No.	Urusan/ Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / sub Kegiatan	Sebelum		Menjadi		Selisih
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)-(5)
	Urusan Penanaman Modal			31.084.382.749		31.991.914.349	907.531.600
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai PM RB perangkat daerah	60	28.776.463.999	60	30.761.456.019	1.984.992.020
		Predikat SAKIP	A		A		
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	84,35	152.531.560	84,35	111.978.178	- 40.553.382
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	37.205.420	2 Dokumen	74.592.710	37.387.290
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	6.521.420	2 Dokumen	2.366.460	- 4.154.960
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.738.420	1 Dokumen	2.981.210	- 4.757.210
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.732.710	1 Dokumen	2.528.355	- 5.204.355
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	12.375.420	2 Dokumen	4.180.710	- 8.194.710
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	21.972.848	9 Laporan	8.772.424	- 13.200.424

No.	Urusan/ Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / sub Kegiatan	Sebelum		Menjadi		Selisih
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)~(9)-(5)
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	16.281.266	6 Laporan	7.045.633	- 9.235.633
1.1.8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.082.420	1 Dokumen	1.872.210	- 3.210.210
1.1.9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	4.875.710	1 Data	1.768.855	- 3.106.855
1.1.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	24.507.296	1 Berita Acara	2.407.296	- 22.100.000
1.1.11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	5 Dokumen	8.238.630	5 Dokumen	3.462.315	- 4.776.315
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Capaian Realisasi Keuangan pertahun	93,00%	18.249.280.441	93,00%	23.153.107.892	4.903.827.451
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang	18.180.346.328	161 Orang	23.124.032.465	4.943.686.137
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.618.905	1 Dokumen	584.000	- 1.034.905
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2.289.749	1 Dokumen	1.509.758	- 779.991
1.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	2.763.980	1 Dokumen	876.000	- 1.887.980
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.783.754	1 Laporan	4.103.528	- 5.680.226
1.2.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	5.639.821	2 Dokumen	1.752.000	- 3.887.821
1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan	6 Laporan	42.988.144	6 Laporan	19.157.750	- 23.830.394

No.	Urusan/ Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / sub Kegiatan	Sebelum		Menjadi		Selisih
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)-(9)-(5)
		Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
1.2.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.849.760	1 Dokumen	1.092.391	- 2.757.369
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	217.360.000	100%	208.680.000	- 8.680.000
1.3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	8.680.000	60 Orang	8.680.000	-
1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	208.680.000	60 Orang	200.000.000	- 8.680.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.424.733.829	100%	1.158.637.693	- 266.096.136
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	28.859.990	3 Paket	17.315.994	- 11.543.996
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	224.048.930	6 Paket	202.796.130	- 21.252.800
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	211.628.709	3 Paket	135.578.969	- 76.049.740
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	282.596.200	6 Paket	271.821.600	- 10.774.600
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	462.500.000	3 Dokumen	462.500.000	-
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	215.100.000	1 Laporan	68.625.000	- 146.475.000
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	7.270.029.769	1 Tahun	5.233.084.238	- 2.036.945.531
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	956.856.397	1 Laporan	894.960.326	- 61.896.071

No.	Urusan/ Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / sub Kegiatan	Sebelum		Menjadi		Selisih
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)=(9)-(5)
1.5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	78.000.000	1 Laporan	78.000.000	-
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	6.235.173.372	1 Lap	4.260.123.912	- 1.975.049.460
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.462.528.400	12 Bulan	895.968.018	- 566.560.382
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	98.840.000	2 Unit	98.840.000	-
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pertizinannya	38 Unit	958.250.000	36 Unit	514.600.072	- 443.649.928
1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	395.338.400	10 Unit	277.477.946	- 117.860.454
1.6.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	10.100.000	1 Unit	5.050.000	- 5.050.000
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor	1860 Investor	109.702.499	1860 Investor	41.052.400	- 68.650.099
2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	35.855.399	1 Dokumen	25.612.800	- 10.242.599
2.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah /Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	32.465.549	1 Dokumen	14.298.800	- 18.166.749
2.1.2	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Kegiatan Usaha	3.389.850	1 Kegiatan Usaha	11.314.000	7.924.150
2.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Peta Potensi Investasi	1 Laporan	73.847.100	1 Laporan	15.439.600	- 58.407.500

No.	Urusan/ Bidang Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / sub Kegiatan	Sebelum		Menjadi		Selisih
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)=(9)-(5)
2.2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	29.370.600	1 Dokumen	12.809.600	- 16.561.000
2.2.2	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	44.476.500	1 Dokumen	2.630.000	- 41.846.500
3	Program Promosi Penanaman Modal	Presentase peningkatan calon investor yang menerima informasi potensi investasi daerah	100%	1.106.303.152	100%	689.116.000	- 417.187.152
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pameran penanaman modal	3 Kali	1.106.303.152	3 Kali	689.116.000	- 417.187.152
3.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.099.865.000	1 Dokumen	686.666.000	- 413.199.000
3.1.2	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	6.438.152	1 Dokumen	2.450.000	- 3.988.152
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan sesuai SOP	90%	735.991.039	90%	296.597.130	- 439.393.909
4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	735.991.039	100%	296.597.130	- 439.393.909
4.1.1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6300 Pelaku Usaha	62.403.006	6300 Pelaku Usaha	31.520.380	- 30.882.626
4.1.2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	270 Orang	369.666.499	270 Orang	118.364.750	- 251.301.749
4.1.3	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	5300 Kegiatan Usaha	303.921.534	5300 Kegiatan Usaha	146.712.000	- 157.209.534

No.	Urusan/ Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / sub Kegiatan	Sebelum		Menjadi		Selisih
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)=(9)-(5)
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Presentase Pengendalian terhadap Penanaman Modal	100%	306.982.252	100%	190.844.800	- 116.137.452
5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Monev Penanaman Modal	4 Laporan	306.982.252	4 Laporan	190.844.800	- 116.137.452
5.1.1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5 Kegiatan Usaha	64.998.074	5 Kegiatan Usaha	44.005.000	- 20.993.074
5.1.2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	30 Pelaku Usaha	119.997.694	30 Pelaku Usaha	59.020.800	- 60.976.894
5.1.3	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	22 Kegiatan Usaha	121.986.484	22 Kegiatan Usaha	87.819.000	- 34.167.484
6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Presentase potensi investasi yang terintegrasi dalam sistem informasi penanaman modal	100%	48.939.808	100%	12.848.000	- 36.091.808
6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media informasi dan data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara Elektronik	1 Jenis	48.939.808	1 Jenis	12.848.000	- 36.091.808
6.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	48.939.808	1 Dokumen	12.848.000	- 36.091.808
TOTAL PAGU				31.084.382.749		31.991.914.349	907.531.600

3.2 Target Pendapatan

Tabel 3. 2

Perubahan Target Pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

No	Uraian Pendapatan	Sebelum (Rp)		Menjadi (Rp)			
		Pajak	Retribusi	Pendapatan Lain	Pajak	Retribusi	Pendapatan Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	JUMLAH	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3.3 Rencana Kerja dan Pendanaan

Tabel 3. 3

Perubahan Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Indikator	Target Capaian	Lokasi	Indikatif (Rp)	Penanggung jawab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				Nilai PM RB perangkat daerah	60	Tangsel	30.761.456.019	DPMPTSP	Tetap
					Predikat SAKIP	A				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Nilai AKIP	84,35		111.978.178	DPMPTSP	Tetap
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RKT 2025, Renstra 2025- 2029	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokum en	Tangsel	74.592.710	DPMPTSP	Tetap

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Indikator	Target Capaian	Lokasi	Indikatif (Rp)	Penanggung jawab	Keterangan
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA 2026, DRPK, ROK 2026	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Tangsel	2.366.460	DPMPTSP	Tetap
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen PERUBAHAN RKA-SKPD	RKA Perubahan 2025, DRPK dan ROK Perubahan 2025	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Tangsel	2.981.210	DPMPTSP	Tetap
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA 2026	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Tangsel	2.528.355	DPMPTSP	Tetap
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pergeseran Anggaran, DPA Perubahan 2025	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	Tangsel	4.180.710	DPMPTSP	Tetap
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Laporan Bulanan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah [LPPD] Tahun 2024, LKPJ Tahun 2024, Indikator Kinerja Kunci [IKK] Tahun 2024, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah [LAKIP] Tahun 2024, Daftar Penilaian Resiko, DPR Tahun 2025, SPIP Tahun 2025, Sistem Informasi Pembangunan Daerah [SIPD], Laporan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	Tangsel	8.772.424	DPMPTSP	Tetap
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kegiatan, Monev Rencana Aksi, Monev Rencana Aksi DPR,	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	Tangsel	7.045.633	DPMPTSP	Tetap

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Indikator	Target Capaian	Lokasi	Indikatif (Rp)	Penanggungjawab	Keterangan
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Monev Renstra, Evaluasi RENJA, Evaluasi SPIP						
			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Tangsel	1.872.210	DPMPPTSP	Tetap
			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Data	Tangsel	1.768.855	DPMPPTSP	Tetap
			Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Forum OPD	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Tangsel	2.407.296	DPMPPTSP	Tetap
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	ndikator Kinerja Utama [IKU] dan Penyusunan Penetapan Kinerja [2025], Indikator Kinerja Individu [IKI] Tahun 2025, Pohon Kinerja [CASCADING], Rencana Kerja Tahunan [RKT]	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	5 Dokumen	Tangsel	3.462.315	DPMPPTSP	Tetap
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Presentase Capaian Realisasi Keuangan pertahun	93,00%	Tangsel	23.153.107.892	DPMPPTSP	Tetap
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	161 Orang	Tangsel	23.124.032.465	DPMPPTSP	Tetap
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Tangsel	584.000	DPMPPTSP	Tetap

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Indikator	Target Capaian	Lokasi	Indikatif (Rp)	Penanggung jawab	Keterangan
01						1 Dokumen	Tangsel	1.509.758	DPMPTSP	Tetap
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Tangsel	876.000	DPMPTSP	Tetap
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaa Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Tangsel	4.103.528	DPMPTSP	Tetap
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, Penyusunan Laporan Barang Pakai Habis dan Aset SKPD Akhir Tahun, Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Tangsel	1.752.000	DPMPTSP	Tetap
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Fasilitasi Persiapan Pemeriksaan Inspektorat, Fasilitasi Penyelesaian TLHP Inspektorat, Fasilitasi Persiapan Pemeriksaan BPK	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	Tangsel	19.157.750	DPMPTSP	Tetap
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan, Rekonsiliasi SP2D, Rekonsialisasi Barang Pakai Habis dan Aset, Laporan Keuangan Semester, Laporan Pajak Semester, Laporan Daftar Transaksi Harian Semester	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	6 Laporan	Tangsel	1.092.391	DPMPTSP	Tetap
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Tangsel	208.680.000	DPMPTSP	Tetap
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Presentase Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Tangsel			

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Indikator	Target Capaian	Lokasi	Indikatif (Rp)	Penanggung jawab	Keterangan
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	Tangsel	8.680.000	DPMPPTSP	Tetap
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Bidang Layanan Perizinan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	Tangsel	200.000.000	DPMPPTSP	Tetap
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Presentase Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Tangsel	1.158.637.693	DPMPPTSP	Tetap
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Tangsel	17.315.994	DPMPPTSP	Tetap
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Tangsel	202.796.130	DPMPPTSP	Tetap
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Tangsel	135.578.969	DPMPPTSP	Tetap
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Tangsel	271.821.600	DPMPPTSP	Tetap
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Tangsel	462.500.000	DPMPPTSP	Tetap
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Tangsel	68.625.000	DPMPPTSP	Tetap
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Waktu Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	Tangsel	5.233.084.238	DPMPPTSP	Tetap

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Indikator	Target Capaian	Lokasi	Indikatif (Rp)	Penanggung jawab	Keterangan
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Komunikasi sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Tangsel	894.960.326	DPMPTSP	Tetap
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Tangsel	78.000.000	DPMPTSP	Tetap
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	Tangsel	4.260.123.912	DPMPTSP	Tetap
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Tangsel	895.968.018	DPMPTSP	Tetap
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Tangsel	98.840.000	DPMPTSP	Tetap
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	Tangsel	514.600.072	DPMPTSP	Tetap
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Mesin dan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Tangsel	277.477.946	DPMPTSP	Tetap
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	Tangsel	5.050.000	DPMPTSP	Tetap

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Indikator	Target Capaian	Lokasi	Indikatif (Rp)	Penanggung jawab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Pengembangan iklim penanaman modal				Jumlah Investor	1860 Investor	Tangsel	41.052.400	DPMPTSP	Tetap
		Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen		25.612.800	DPMPTSP	Tetap
			Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Sosialisasi FGD dengan OPD terkait, Sosialisasi Perwal Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif, Iklan	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	Tangsel	14.298.800	DPMPTSP	Tetap
			Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten /Kota	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Kegiatan Usaha	Tangsel	11.314.000	DPMPTSP	Tetap
		Pembuatan peta potensi kabupaten/kota			Jumlah Laporan Peta Potensi Investasi	1 Laporan	Tangsel	15.439.600	DPMPTSP	Tetap
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Penginputan data investasi (Layanan Perizinan dan Investasi)	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen		12.809.600	DPMPTSP	Tetap
			Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	FGD sinkronisasi kegiatan OPD Teknis, Sosialisasi perwal rupm, Kajian Teknis Revisi Perwal RUPM	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	Tangsel	2.630.000	DPMPTSP	Tetap
3	Program promosi penanaman modal				Presentase peningkatan calon investor yang menerima informasi potensi investasi daerah	100%	Tangsel	689.116.000	DPMPTSP	Tetap
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			Jumlah Kegiatan pameran penanaman modal	3 Kali	Tangsel	689.116.000	DPMPTSP	Tetap

XVIII.70

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Indikator	Target Capaian	Lokasi	Indikatif (Rp)	Penanggung jawab	Keterangan
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Pameran Nasional, Apeksi 2025, Launching Apeksi 2025, Rapat persiapan Pameran, Tenu Investor, Investment Awards	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	Tangsel	686.666.000	DPMPTSP	Tetap
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	Coffe Morning, Draft perwal promosi	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/ Kota	1 Dokumen	Tangsel	2.450.000	DPMPTSP	Tetap
4	Pelayanan Penanaman Modal				Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan sesuai SOP	90%	Tangsel	296.597.130	DPMPTSP	Tetap
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			Presentase Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	Tangsel	296.597.130	DPMPTSP	Tetap
			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Perizinan Expo	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6300 Pelaku Usaha	Tangsel	31.520.380	DPMPTSP	Tetap
			Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	ISO 9001:2015, SKM, Regulasi/ Advokasi, Pengaduan Masyarakat, Evaluasi Standar Pelayanan dan SOP, Pendampingan Penilaian PTSP	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	270 Orang	Tangsel	118.364.750	DPMPTSP	Tetap
			Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha	Pemantauan Kelompok Kerja Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha,	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis,	5300 Kegiatan Usaha	Tangsel	146.712.000	DPMPTSP	Tetap

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Indikator	Target Capaian	Lokasi	Indikatif (Rp)	Penanggung jawab	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			berbasis risiko	Pemantauan Perizinan Kelompok Kerja I, Pemantauan Perizinan Kelompok Kerja II, Pemantauan Perizinan Kelompok Kerja III, Pemantauan Perizinan Kelompok Kerja, Pengawasan Perizinan Pengendalian & Pelaksanaan Penanaman Modal.	evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha					
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				Presentase Pengendalian terhadap Penanaman Modal	100%	Tangsel	190.844.800	DPMPSTP	Tetap
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			Jumlah Laporan Kegiatan Money Penanaman Modal	4 Laporan		190.844.800	DPMPSTP	Tetap
			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Identifikasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, Evaluasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5 Kegiatan Usaha	Tangsel	44.005.000	DPMPSTP	Tetap

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pekerjaan	Indikator	Target Capaian	Lokasi	Indikatif (Rp)	Penanggung jawab	Keterangan
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Bimbingan Teknis Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	30 Pelaku Usaha	Tangsel	59.020.800	DPMPPTSP	Tetap
			Pengawasan Penanaman Modal	Rapat Analisa dan verifikasi data, profil dan informasi Pelaku Usaha, Rapat Evaluasi Penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha Pelaku Usaha, Inspeksi Lapangan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan	22 Kegiatan Usaha	Tangsel	87.819.000	DPMPPTSP	Tetap
6	Program Pengelolan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal				Presentase potensi investasi yang terintegrasi dalam sistem informasi penanaman modal	100%	Tangsel	12.848.000	DPMPPTSP	Tetap
		pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/ kota			Jumlah media informasi dan data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara Elektronik	1 Jenis	Tangsel	12.848.000	DPMPPTSP	Tetap
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Fasilitasi Pendampingan Sistem Pemeliharaan di PTSP, Laporan Data Perizinan dan Non Perizinan Pertahun, Pembuatan Layanan Informasi Perizinan, Rapat Koordinasi Terkait Sistem OSS	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	Tangsel	12.848.000	DPMPPTSP	Tetap
TOTAL PAGU								31.991.914.349		

3.4 Rencana Kerja dan Pendanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 3. 4

Perubahan Rencana Kerja Dan Pendanaan Standar Pelayanan Minimal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SPM	Target SPM	Misi/ Tujuan Daerah/ Sasaran Daerah	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan/ Pekerjaan	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Pekerjaan	Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3.5 Rencana Kerja dan Pendanaan Fokus Pembangunan Kepala Daerah

Tabel 3. 5

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Fokus Pembangunan Kepala Daerah Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Misi/ Tujuan Daerah/ Sasaran Daerah	Fokus Pembangunan KDH	Konsep	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan/ Pekerjaan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan Berbasis Potensi Unggulan Daerah, Inovasi dan Teknologi							
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi							

Misi/ Tujuan Daerah/ Sasaran Daerah	Fokus Pembangunan KDH	Konsep	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan/ Pekerjaan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Investasi Daerah berbasis potensi local yang berkualitas dan berkelanjutan	Peningkatan Pelayanan Perizinan Yang Cepat, Murah dan Transparan	Menyediakan system perizinan yang memadai dan update	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		90%	296.597.130	Tetap
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		100%	296.597.130	Tetap
				Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6300 Pelaku Usaha	31.520.380	Tetap
				Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	270 Orang	118.364.750	Tetap
				Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	5300 Kegiatan Usaha	146.712.000	Tetap
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		100%	12.848.000	Tetap
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1 Jenis	12.848.000	Tetap
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Dokumen	12.848.000	Tetap
Total Pagu						309.445.130	

3.6 Rencana Kerja dan Pendanaan Hibah dan Bantuan Sosial

Tabel 3. 6

Perubahan Rencana Kerja Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2025
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hibah				Keterangan	Bantuan Sosial					Keterangan
	Pengusul dan Alamat	Nilai (Rp)				Pengusul dan Alamat	Calon Penerima dan Alamat	Nilai (Rp)			
		Usulan	Rekomendasi	Diberikan				usulan	Rekomendasi	Diberikan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3.7 Rencana Kerja dan Pendanaan Kegiatan Hasil Musyawarah Pembangunan Kelurahan LK

Tabel 3. 7

Perubahan Rencana Kerja Hasil Musyawarah
Pembangunan Kelurahan Tahun 2025

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Usulan			Keterangan
	Pekerjaan	Lokasi	Nilai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB IV

PENUTUP

4. 1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

1. Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 (1): Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, seperti : Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
2. Bahwa didalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tahun 2024 telah mengacu pada ketentuan " Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Program dan kegiatan tahun anggaran 2025 yang direncanakan mengacu pada RPJPD, RPJMD Kota Tangerang Selatan dan Renstra serta Perubahan RKPD.
4. Dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah maka program / kegiatan yang direncanakan dengan memperhatikan skala prioritas, sehingga diharapkan rencana program dan kegiatan pembangunan yang telah dirancang mampu mengakomodir permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

4. 2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota

Tangerang Selatan hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, akuntabel, transparan, profesional, partisipatif dan penuh tanggung jawab dengan kaidahkaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tangerang Selatan, serta masyarakat termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam Rancangan RPJMD 2025-2029 dengan sebaik baiknya;
- b. OPD Kota Tangerang Selatan, berkewajiban menyusun rencana strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD masing-masing, yang berpedoman pada Rancangan RPJMD Kota Tangerang Selatan 2025-2029, yang nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD
- c. Penyusunan perencanaan bidang penanaman modal dan pelayanan Perizinan terpadu;
- d. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan Perizinan terpadu;
- e. Pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan Perizinan terpadu;
- f. Pembinaan terhadap pelaksana teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
- g. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.3 Rencana tindak lanjut

Dengan telah ditetapkan Peraturan Wali kota Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan sebagai lembaga PTSP Kota Tangerang Selatan diberi kewenangan untuk menangani Perizinan, sehingga ke depan akan berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana program, pelayanan publik, alur proses

pelayanan Perizinan yang efisien dengan biaya rendah serta ketersediaan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan sistem pelayanan terpadu satu pintu.

Dengan disusunnya perubahan rencana kerja 2025 ini diharapkan pengembangan penanaman modal dan Perizinan dapat diwujudkan secara terencana dan semua pihak dapat berpartisipasi secara aktif.

Tangerang Selatan, Juni 2025

Kepala

**Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Tangerang Selatan**



H. MAULANA PRAYOGA U.P. ST, MIDS

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19780209 200212 1 007